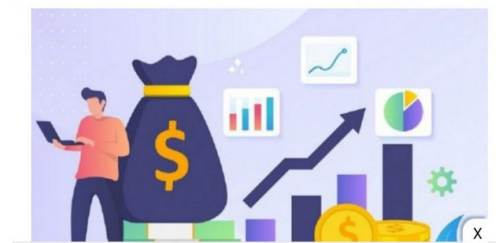


	News Title : Waspada Investasi Ilegal, Bappebti Blokir 218 Domain Perdagangan Berjangka Komoditi	
	Media Name : jambi-independent.co.id	Journalist : viz
	Publish Date : 21 April 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : -	Topic : Blokir Situs Ilegal

Waspada Investasi Ilegal, Bappebti Blokir 218 Domain Perdagangan Berjangka Komoditi

Kamis, 21 April 2022 - 12:33:15 WIB



Penulis Editor

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Peringatan bagi Anda yang ingin berinvestasi. Khususnya investasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal. Penuh resiko yang harus Anda hadapi.

Baru baru ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sedikitnya 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pada periode Januari-Maret 2022.

Disampaikan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison bahwa Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

"Dari hasil pengawasan situs dan web tersebut, maka Bappebti memblokir sedikitnya 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama Januari-Maret 2022," ujarnya.

Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga kita tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait," ujarnya.

Dikatakan Aldison bahwa meskipun mereka mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, jika melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti.

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," katanya.

Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK.

Aldison juga mengingatkan berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat.

Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.

Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut," ungkap Aldison.

Selain itu, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka diimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergurur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan <https://www.bappebti.go.id>," tandas Aldison. (viz)